

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Andika Mayansara Saboli, L. B. (2019). Peran Dukungan Masyarakat terhadap Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Roko di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. *Health Information Journal* , 165-172.
- Ardial. (2018). *Komunikasi Organisasi* (H. Wahyuni Ed.). Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Armando, N. M. (2016). Siswa sebagai Agen Perubahan: Menumbuhkan Kemampuan Literasi Media Siswa untuk Menolak Iklan dan Promosi Rokok di Sekolah. *Indonesian Tobacco Control Network* .
- Armansyah, Y. (2015). Sekolah Ramah Anak Berbasis Perda: Studi pada Peraturan Walikota Jambi Nomor 189 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. *Harkat* , 31-40.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan Depok*: PT Rajagrafindo Persada.
- Azwar, S. (2007). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Batara, A. S. (2018). *Healthy Setting Ruang Publik Perkotaan*. Makassar: CV Sosial Politic Genius (SIGn).
- Burhanuddin, S. &. (2015). *Teori Perilaku Keorganisasian Dilengkapi: Intervensi Pengembangan Organisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Bustan, M. N. (2007). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Carole Wade, C. T. (2008). *Psikologi Edisi 9 Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research : Plening, Conductiong and Evaluating Quantitatif and Qualitatif Reseach*. Boston: Boston Person .
- R. A. (2017). *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan*. ogyakarta: Deepublish.



Danang Sunyoto, B. (2015). *Teori Perilaku Keorganisasian Dilengkapi: Intervensi Pengembangan Organisasi* Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

*Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan 2011* Yogyakarta Pustaka Pelajar

Dayakisni, H. (2003). *Psikologi Sosial*. Malang: UMM Press.

Dewi. (2016). *Studi Analisis Kebijakan Bandung*: CV Pustaka Setia

Depkes. (2019, Mei). *HTTS 2019: Jangan Biarkan Rokok Merenggut Napas Kita*. Dipetik desember 3, 2019, dari Depkes Web site: [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)

Dinkes Pangkep. (2019). *Profil Kesehatan Kabupaten Pangkep*. Kabupaten Pangkep: Dinas Kesehatan.

Effendy, O. (2002). *Teori dan Filsafat Komunikasi* Bandung: PT. Rosda karya.

Erna Waliyanti, Y. H. (2016). Faktor-faktor yang Memepengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Kampus Bebas Asap Rokok di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Muhammadiyah Journal of Nursing* , 135-142.

Fajri Azhari, M. F. (2016). Hubungan Penerapan Kawasn Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah dan Faktor Lainnya terhadap Perilaku Merokok Remaja di SMP Muhammadiyah 17 Ciputat. *Indonesia Tobacco Control Network*.

Free, G. S. (2009). *Smokefree Air Law Enforcement*. Washington DC: Global Smokefree Partnership.

Gobel, Erwin, Z., & Koton, Y. P. (2016). *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Husain, d. A. (2007). *Tobat Merokok: Rahasia & Cara Empatik Berhenti Merokok*. Cinere, Depok: Pustaka Iman.

Hutahayan, J. F. (2019). *Informasi & Kinerja Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Indar, A. A. (2019). *Hukum & Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish .



Vi. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yokyakarta anisius.

- Infodatin. (2018). *Situasi Umum Komsumsi Tembakau di Indonesia*. Jakarta Selatan: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
- Javid Ahmed Khan, A. M. (2016). Tobacco Control Laws in Pakistan and Their Implementation: A Pilot Study in Karachi.
- Kemenkes. (2011). *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Pusat Promosi Kesehatan
- Kemenkes., P. P. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Kemenkes. (2011). Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* , hal. 3-52.
- Kemenkes, R. (2013). Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. *Pusat Promosi Kesehatan*.
- Liliweri, A. (2011). *Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Litbangkes. (2018). Perilaku Beresiko Kesehatan Pada Pelajar SMP dan SMA di Indonesia. *Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI* , 4-5.
- Martha, K. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*. Depok : Raja Grafindo Persada
- Murni. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Walikota Kendari Hasanuddin Makassar*.
- Mua, E., Sudirman, & Kadri, A. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Kulawi. *Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu* .
- Muhammad Gazali Bagus Ani Putra, I. H. (2012). *Pengantar Psikologi Sosial*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).
- Nawi, R. (2017). *Perilaku Kebijakan Organisasi* . Bandung: Ekses Media Grafisindo.
- Nesherim, J. C. (2016). Public Understanding of Cigarette Smoke Constituents: Three US Surveys. 592-599.



- P. Ay, E. E. (2016). Noncompliance to Smoke-Free Law: Which Hospitality Premises are More Prone? *Public Health* , 1-6.
- Palluturi, S. (2018). *Healthy Cities: Konsep Global, Implementasi L*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, M. G. (2012). *Pengantar Psikologi Sosial*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).
- Reza Monica, A. P. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rifqi, A. I. (2017). A. Ikram Rifqi. *Universitas Hasanuddin*, 110.
- Riskesdas. (2018). *Laporan Nasional Riskesda 2018*.
- Rochka, M. M., Anwar, A. A., & Rahmadani, S. (2019). *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- Riskesda. (2010). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan . *Kementrian Kesehatan RI* .
- Saifullah, M. I. H. T. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat*, 5 No. 1, 44-55.
- Sandi, K. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar. *UIN Alauddin Makassar*, 12.
- Sitepoe. (2000). *Kekhususan Rokok Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sofia Farahdina, K. C., Emmy Riyanti. (2016). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Kelurahan Kota Semarang. *jurnal kesehatan masyarakat*, 4 Nomor 3.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* Alfabeta.
- Susanti. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar Tahun 2018 (Tesis). *Universitas Hasanuddin Makassar*.



Z. (2016). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di MA Gajah Mada Yogyakarta *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Vol. Edisi 6, 567-577.

- Tarupay, A. (\_\_\_). Perilaku Merokok Mahasiswa di Kota Masyarakat. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Unhas*, 3.
- Tenri, M. S. (2005). Studi Kolesterol Antara Kompensasi dan Sikap Guru Terhadap Tugas dengan Disiplin Kerja Guru. *Universitas Islam* 45.
- Trihastuti, A. E. (2019). *Komunikasi Internal Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- UGM. (2018). *Jumah Perokok indonesia di Atas 15 Tahun Tinggi*. Jogjakarta: UGM.
- Uddin B Sore, S. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- UGM. (2018). *Jumah Perokok indonesia di Atas 15 Tahun Tinggi*. Yogyakarta: UGM.
- Wahab, A., Solichin (2001). *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- WHO. (2008). *MPOWER: A Policy Package the Tobacco Epidemic*. Geneva: WHO.
- WHO. (2019). Prevalence to the WHO Framework convention on tobacco control. Retrieved Desember, 2019, from [http://www.who.int/fctc/signatories\\_parties/en/](http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/)
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winengen. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14 Nomor 1*, 1-16.
- Yoshef Arieka Marchel, R. I. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai Pencegahan Merokok pada Remaja Awal. *The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 144-155.
- Zulaeha. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, studi pada Rumah Sakit Umum Undata Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 58-67.



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khumairah  
 Tempat dan tanggal lahir : Pangkep 17 Februari 1995  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 NIM : K012181101  
 Jurusan : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Alamat : Pangkep  
 Nomor telepon : 0852 5602 2017  
 Email : [Khumairah.sabri95@gmail.com](mailto:Khumairah.sabri95@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD Tahun 2006 di SDN 21 Pundata Baji
2. Tamat SMP tahun 2009 di SMPN 3 Labakkang
3. Tamat SMA tahun 2012 di SMAN 1 Pangkajene
4. S1 Ilmu Keperawatan tahun 2016 di Universitas Muslim Indonesia
5. Profesi Ners tahun 2018 di Universitas Muslim Indonesia

### Artikel Jurnal yang Pernah di Publikasi

Resource And Bureaucratic Structure Aspect in Regional Implementation Of Regulation Number 10 Of 2013 Concerning Smoking Area Without Cigerattes in High Schools of Pangkep Regency.



# L A M P I R A N



**INFORMED CONSENT**  
**PERSETUJUAN MENJAD INFORMAN**

Selamat pagi/siang/sore,

Perkenalkan nama saya Khumairah mahasiswi program pascasarjana FKM UNHAS dan sedang melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Kabupaten Pangkep, semua informasi yang didapatkan dari hasil wawancara akan digunakan sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir penelitian.

Saya berharap bapak/ibu/saudara(i) bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini dimana akan dilakukan wawancara mendalam terkait dengan penelitian

Setelah saudara membaca maksud dan kegiatan penelitian di atas, saya mohon untuk mengisi nama dan tanda di bawah ini.

**Nama** : \_\_\_\_\_

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk ikut serta di dalam penelitian ini.





**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2013  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
DI SMA KABUPATEN PANGKEP**

---

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DPRD**

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama informan :  
 Usia :  
 Jenis kelamin :  
 Alamat :  
 Jabatan :  
 Masa Kerja/Angkatan :  
 No.HP/Telp.Informan :  
 Tanggal Wawancara :

Variabel	Pertanyaan wawancara
Komunikasi	1. Bagaimana awal terbentuknya Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pangkep ?  2. Bagaimana Komunikasi dari DPRD kepihak Dinas Kesehatan dan dinas pendidikan terkait perda KTR No. 10 Tahun 2013 tetang kawasan tanpa rokok ?  3. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang KTR ?  4. Apa saja area wajib KTR yang bapak/ibu ketahui ?
Sumber Daya	e. Bagaimana ketersediaan sumber daya penunjang KTR di Kabupaten Pangkep ?  f. Apakah ada satgas khusus perda KTR sesuai isi dalam perda No. 10 tahun 2013 pada bab 7 pasal 15 ayat 4 ?  g. Apakah ada media informasi yang dikeluarkan dari DPRD ?  h. Apakah pemerintah memberikan dana khusus terkait perda KTR ?
ur	a. Apakah ada kelompok kerja yang diberikan



Birokrasi	wewenang untuk mengatur, menyelenggara dan mengawasi KTR sesuai isi Perda No. 10 Tahun 2013 pasal 4 ayat 1
Disposisi (Sikap)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya perda KTR</li><li>b. Menurut bapak/ibu dengan adanya perda KTR larangan merokok efektif untuk menurunkan jumlah perokok ?</li><li>c. Bagaimana harapan bapak/ibu kedepannya terkait penerpaan KTR</li><li>d. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan bagi yang melanggar KTR ?</li></ol>





**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2013  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
DI SMA KABUPATEN PANGKEP**

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DINAS KESEHATAN DAN  
DINAS PENDIDIKAN**

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama informan :  
Usia :  
Jenis kelamin :  
Alamat :  
Jabatan :  
Masa Kerja/Angkatan :  
No.HP/Telp.Informan :  
Tanggal Wawancara :

<b>Variabel</b>	<b>Pertanyaan wawancara</b>
Komunikasi	1. Bagaimana bentuk Komunikasi Dinas Kesehatan dan pendidikan tentang PERDA Kabupaten Pangkep No.10 tahun 2013 kepada pihak sekolah, sesuai isi perda bab 7 pasal 15 ayat 2 ?
Sumber Daya	1. Apakah tersedia media informasi perda KTR (Iklan, posko pelayanan <i>hotline service</i> atau <i>call center</i> ) sesuai dalam perda KTR No. 10 Tahun 2013 Bab III pasal 4-7 ?  2. Apakah ada dana khusus KTR diberikan kesekolah ?  3. Apakah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR sesuai isi Perda pada pasal 15 ayat 7 a
Struktur Birokrasi	1. Apakah ada tim/kelompok kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR sesuai isi perda pada pasal 15 ayat 7 ?
sisi s)	1. Bagaimana menurut bapak/ ibu dengan adanya perda KTR ?  2. Menurut bapak/ibu dengan adanya KTR larangan merokok efektif untuk menurunkan jumlah perokok



	<p>?</p> <p>3. Bagaimana harapan bapak/ibu kedepannya terkait penerapan KTR</p> <p>4. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan bagi yang melanggar KTR ?</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2013  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMA KABUPATEN  
PANGKEP**

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH DAN GURU BK**

**IDENTITAS INFORMAN**

Nama informan :

Usia :

Jenis kelamin :

Alamat:

Jabatan :

Masa Kerja/Angkatan:

No.HP/Telp.Informan :

Tanggal Wawancara :

<b>Variabel</b>	<b>Topik Wawancara</b>
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk komunikasi dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan terkait perda KTR No. 10 Tahun 2013 ?</li> <li>2. Sejak kapan mulai diterapkannya perda KTR No. 10 Tahun 2013 di sekolah ini ?</li> <li>3. Bagaimana pihak sekolah memberikan informasi tentang KTR di sekolah ini ?</li> <li>4. Bagaimana komunikasi internal di lingkungan sekolah terkait perda KTR ?</li> <li>5. Apa yang menjadi faktor penghambat KTR di sekolah ini ?</li> </ol>
Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada satgas khusus KTR di sekolah sesuai perda KTR no. 10 Tahun 2013 pada pasal 12 ayat 1 ?</li> <li>2. Apakah ada tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok di sekolah sesuai perda KTR No. 10 Tahun 2013 pasal 12 ayat 2 ?</li> </ol>
Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada komite/kelompok kerja dibentuk oleh sekolah untuk mengawasi KTR di sekolah ini ?</li> </ol>
i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang adanya Perda No. 10 Tahun 2013 tentang KTR ?</li> <li>2. Menurut bapak/ibu dengan adanya perda KTR larangan merokok efektif untuk menurunkan angka</li> </ol>



	<p>perokok di sekolah ?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Bagaimana dukungan internal untuk mendukung KTR di sekolah ini ?</li><li>4. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya terkait penerapan KTR</li><li>5. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan bagi yang melanggar KTR ?</li></ol>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## PEDOMAN PELAKSANAAN FGD

1. Petunjuk umum FGD
  - a. Ucapan salam
  - b. Perkenalan dua arah
  - c. Beri penjelasan tentang tujuan FGD
  - d. Jelaskan bahwa semua pendapat penting dan diharkan semua peserta dapat mengeluarkan pendapat dengan bebas
  - e. Dalam mengeluarkan pendapat harus saling bergantian
2. Pelaksanaan
  - a. Formulir pencatatan karakteristik informan

No	Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Asal Sekolah

- b. Formulir pencatatan pelaksanaan

Tanggal/waktu/ tempat :	
Fasilitator	:
Notulen	:
Tanggapan	Interpretasi



## c. Materi pertanyaan

No	Pertanyaan
1.	<p style="text-align: center;"><b>Komunikasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dilakukan sosialisasi kebijakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok disekolah saudara/i ?</li> <li>2. Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan perda tentang kawasan tanpa rokok di sekolah saudara/i?</li> <li>3. Siapa yang melakukan sosialisasi kebijakan perda No. 10 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok di sekolah saudara/i ?</li> </ol>
2.	<p style="text-align: center;"><b>Sumber Daya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah tim pengawasan khusus kawasan tanpa rokok di sekolah saudara/i ?</li> <li>2. Jika ada, apakah tim khusus menjalankan tugasnya sesuai perda KTR ?</li> <li>3. Apakah ada media informasi tentang KTR di sekolah ?</li> </ol>
3.	<p style="text-align: center;"><b>Sikap</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sikap saudara/i dalam menaati peraturan daerah No. 10 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok?</li> <li>2. Bagaimana bentuk dari dukungan semua siswa tentang peraturan daerah di sekolah saudara/i?</li> </ol>
4.	<p style="text-align: center;"><b>Struktur Birokrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada organisasi khusus yang dibentuk untuk memeberikan informasi, edukasi dan pengawasan di sekolah ?</li> </ol>



## Matriks Pengumpulan Data Informan

Matriks wawancara mendalam anggota DPRD komisi III, kepala dinas kesehatan dan dinas pendidikan, kepala sekolah dan siswa SMA Kabupaten Pangkep

### A. Input

#### 1. Aspek komunikasi

Hasil wawancara mendalam dengan Anggota DPRD Komisi III, kepala dinas kesehatan dan dinas pendidikan

Pertanyaan	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Preposisi
1. Bagaimana bentuk komunikasi pemerintah kabupaten pangkep ke pihak sekolah	MS	<i>"Kalau sosialisasi dari pemerintah tidak ada langsung dari pemerintah kota melainkan dari puskesmas sosialisasinya ke pihak sekolah dan siswa, bersama juga dari dinas kesehatan mengimbau sekolah menjadi kawasan tanpa rokok karena sudah dikasi wewenang pemuh ke dinas kesehatan untuk langsung mensosialisasikannya kesekolah-sekolah yang ada di kabupaten pangkep."</i>	Komunikasi berjalan maksimal tapi dari pemerintah Belum maksimal berjalannya komunikasi	Informasi yang berjalan dengan baik sangat mempengaruhi keberhasilan berjalannya perda KTR	Secara umum komunikasi mengenai KTR sudah berjalan dengan maksimal jika dari dinas kesehatan dan puskesmas ke sekolah tetapi dari pemerintah ke sekolah tidak ada komunikasi langsung
2. Pengetahan tentang kawasan tanpa rokok					
3. area wajib kawasan tanpa rokok					



	DI	“.. sudah mi dek di sosialisasikan ke pihak sekolah kerjasama dengan pihak puskesmas untuk sampaikan itu perda tentang KTR ke sekolah-sekolah			
	MI	“.. sudah di berikan informasi tentang KTR ke sekolah-sekolah melalui dinas kesehatan			
	MS	“.. kawasan tanpa rokok menurut saya yah area yan bebas dengan asap rokok, misal tidak ada orang yang merokok dalam area yang di batasi. Seperti di tema penelitian mu itu dek area sekolah, area publik, rumah sakit.	Semua informan mengetahui tentang KTR		
	DI	“.. area yang diarang akan adanya produk apapun tentang tembakau di area KTR. Seperti di sekolah, rumah sakita, atau layanan kesehatan, area publik,			



		tempat ibadah dan tempat-tempat lain yang telah diatur oleh perda KTR			
	MI	".. larangan untuk merokok di lingkungan tersebut seperti tempat kerja kantor, sekolah, rumah sakit, taman			
	MZ	".. area wajib untuk kawasan tanpa rokok diantaranya itu fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat-tempat umum, tempat bermain anak dan angkutan umum seperti pete-pete.			

Hasil wawancara mendalam dengan Kepala sekolah dan BK SMAN 1 Pangkep, SMAN 11 Pangkep, SMA MuhammadiyahPangkep, SMKN 7 Pangkep

Pertanyaan	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Preposisi
1. bagaimana tuk isasi rintah	FD	"...sudah ada sosialisasi dari dinas kesehatan tentang perda KTR dan tahun	Informasi KTR di sekolah belum berjalan maskimal sebagian besar mengatakan	Informasi yang berjalan dengan baik akan mempengaruhi berjalan dengan maksimalnya	Informasi mengenai perda KTR belum berjalan



perda KTR 2.		2015 baru ada masuk di sekolah ini mengenai perda itupun karena sekolah kami masuk dalam sekola sehat dan dari dinas kesehatan selau mengedukasi mengenai bahaya akan rokok bagi kesehatan	mengetahui perda dan dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan memberi informasi mengenai perda KTR	perda KTR di ligkungan sekolah. Informasi yang tidak maksimal	maksimal sosialisasinya, karena banyak informan yang mengatahui KTR dari sesama sekolah tidak melalui pemerintah
	MZ	“.. ada dari dinas kesehatan dan pendidikan yang sosialisai kesekolah dan kalau mengenai informasi terkait KTR di sekolah ini biasanya kita bersama guru-guru memberi sosialisasi langsung ke siswa-siswa dan guru yang masih melanggar aturan KTR			Dinas kesehatan ataupun puskesmas tapi semuas ekolah tau akan KTR



	NA	"... karena kita sekolah masih sangat baru jadi dari awal disekolah kita telah menerapkan KTR dan dari pihak dinas kesehatan dinas pendidikan dan puskesmas kota selalu memantau ke sekolah mengenai Perda KTR			
	DW	"... informasi awalnya itu melalui dinas kesehatan yang datang kesekolah untuk memberikan informasi terkait perda KTR, dan memberi kita perdanya langsung, stiker dan baleho untuk dipasang disekolah			
	RP	"... sekolah kita itu dari awal memang sudah dapat penghargaan			



		sekolah sehat dari provinsi, sebelum ada perda KTR disekolah kita memang tidak boleh ada yang merokok cuman setelah ada perda makin ketat aturan itu			
	RW	"...kalau pemberian informasi dari guru BK ke siswa terkait KTR sudah ada mi di dalam tata tertib sekolah di masukkan sudah jelas juga ditempel baleho stiker di lingkungan sekolah			
	MR	"...kalau informasi dari pihak sekolah dan isi dari perda tempat-tempat yang merupakan kawasan tanpa rokok itu seperti area publik seperti tempat belajar mengajar,			



		tempat ibadah, tempat bermain anak, dan area-area tertentu agar memberi lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

## 2. Aspek Sumber Daya

Hasil wawancara dengan anggota DPRD, kepala dinas kesehatan, dinas pendidikan kabupaten pangkep, kepala sekolah dan guru BK

Pertanyaan	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Preposisi
Sasaran utama pelaksanaan kawasan tanpa rokok	DW	<i>"...tidak ada pembentukan tim khusus kawasan tanpa rokok, jadi semua yang ada dilingkungan sekolah berhak untuk menegur"</i>	Belum maksimalnya sumber daya saran prasarana	Tidakadanya tim khusus yang dibentuk untuk mengawasi Kawasan tanpa rokok dan belum lengkapnya sarana dan prasarana yang tersedia demi pengawasan kawasan tanpa	Tidak ada tim khusus sarana prasarana karena tidak adanya anggaran khusus kawasan tanpa rokok
	HM	<i>"...setau saya belum ada pembuatan pengawasan secara</i>			



		<p><i>husus jadi Saya kira semua orang yang berada di lingkungan sekolah termasuk siswa-siswa, guru, staf bisa mengawasi.”</i></p>		<p>rokok di sekolah.</p>	
	MZ	<p><i>“...pengawasan oleh semua orang yang berada di lingkungan sekolah, karena tidak ada pengawas secara khusus.”</i></p>			
	RP	<p><i>“...semua pihak berhak untuk mengawasi mulai siswa, guru dan semua orang yang ada di lingkungan sekolah setelah memasuki Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan tidak ada secara khusus pengawasnya semua berhak.”</i></p>			
	MR	<p><i>“... setau saya belum ada itu pembentukan pengawasan secara khusus.”</i></p>			



	MS	<i>"... kita telah memberi wewenang kepada Satpol PP untuk menjadi satgas khusus untuk mengawasi kawasan tanpa rokok di kabupaten pangkep."</i>			
Anggaran dan dana khusus KTR	MZ	<i>"...Selama ini belum ada alokasi dana khusus KTR baik dari pemerintah tapi walaupun ada penganggarannya diadakan oleh sekolah, tapi pernah kita minta bantuan ke dinas kesehatan dan pendidikan jika ingin spanduk dan papan informasi KTR."</i>			Tidak ada anggaran khusus terkait penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah
	MH	<i>"...belum ada penganggaran dari pemerintah tentang ini aturan."</i>			
	FD	<i>"... Saya kira kalau larangan tidak perlu"</i>			



	RW	<p>ada anggaran khusus, kita kadang di bantu oleh dinas kesehatan dan pendidikan jika meminta spanduk KTR.”</p> <p>“Terkait anggaran dana tidak ada alokasi baik dari pemerintah maupun dari sekolah karena kita kan sekolah swasta.”</p>			
	MR	<p>“Mengenai anggaran yang saya ketahui tidak ada alokasi dana khusus baik dari pemerintah atau dari sekolah.”</p>			
Saranan dan prasaaran KTR	MR	<p>“kemarin ada dek spanduknya cuman karena lama mi toh rusak mi jadi dilepas belum ada gantinya sampai sekarang.”</p>			
	RP	<p>“...ada spanduk, papan informasi besar, stiker, yang tertempel</p>			



		<p><i>didinding, lengkap dek kalau di sekolah kita biar orang yang berada atau ingin masuk di sekolah kita mengetahui kalau sekolah kita bebas dari asap rokok”</i></p> <p><i>“..Kita bisa liat adanya spanduk larangan merokok, stiker di jendela-jendela kelas, di tembok-tembok dipasang dengan jelas karena sekolah kita menjadi kawasan tanpa rokok dan sekola adiwiyata.”</i></p>			
	HM				
	MA	<p><i>“...untuk sekarang sekolah kita tidak ada spanduk atau tempelan didinding tentang kawasan tanpa rokok karena rusak terus belum di ganti, rencana akan di buat secepatnya tapi sekolah kita</i></p>			



	RW	<p><i>merupakan kawasan tanpa rokok.”</i></p> <p><i>“.. ada dek Kita bisa liat adanya spanduk larangan merokok karena menjadi kawasan tanpa rokok tapi sudah mau rusak itu spanduk.”</i></p>			
Organisasi yang ikut serta dalam pelaksanaan KTR	RP	<p><i>“..semua orgnaisasi disini ikut terlibat semua untuk awasi siswa, guru-guru dan pengunjung lain yang masuk kesekolah.”</i></p>	Organisasi sekolah semua ikut serta	Semua organisasi di sekolah yaitu PMR, osis, Pramuka semua ikut serta dalam pengawasan KTR yang di bimbing langsung oleh guru BK	Semua orgaisasi berperan aktif dalam pengawasan KTR
	HM	<p><i>“.. kalau disini semua organisasi mulai dari Osis, Pramuka, PMR kerjasama dengan BK Untuk Mengawasi Siswa, guru dan pengunjung.”</i></p>			
	MZ	<p><i>“Osis ji yang selalu berperan aktif saya liat dan berkoordinasi</i></p>			



	MR	<i>dengan BK untuk awasi siswa-siswa.”</i>			
	FD	<i>“Organisasi yang terlibat setau ku itu Osis ji sama pramuka .”</i>			
		<i>“Organisasi yang terlibat untuk mengawasi siswa yaitu OSIS dan Pramuka bekerjasama dengan BK dan guru-guru yang piket untuk mengawasi siswa.”</i>			

### 3. Aspek Struktur Birokrasi

Hasil wawancara mendalam dengan anggota DPRD, kepala dinas kesehatan, dinas pendidikan kabupaten pangkep, kepala sekolah dan Guru BK

Pertanyaan	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Preposisi
Struktur birokrasi pelaksanaan kawasan kok	HM	<i>“.. tidak ada dek struktur organisasi secara khusus untuk pengawasan KTR, cuman struktur di sekolah yang digunakan untuk pembinaan kepada siswa dan penegakan aturan yang ada.”</i>			
	DW	<i>“.. kalau sola struktur yang ada struktur sekolah ji untuk pengawasan KTR tidak ada struktur sendiri untuk KTR”.</i>			



	FD	<i>".. hanya ada struktur sekolah tidak ada di buat struktur KTR kalau di sekolah kami".</i>			
	MZ	<i>"..belum di buat struktur KTR mungkin nanti di rapatkan bersama guru-guru</i>			
	MA	<i>".. tidak ada untuk struktur KTR hanya Struktur Sekolah"</i>			
Pembagian wewenang pengawasan penerapan kawasan tanpa rokok	HM	<i>"..mengenai pembagian wewenang kawasan tanpa rokok disekolah, tidak ada pembagian wewenang secara khusus semua berhak menegur atau bahkan memberikan saran terkait KTR".</i>			
	MZ	<i>".. ada SK dari kepala sekolah tentang pembagian wewenang pengawasan tanpa rokok di sekolah kami, tapi awalnya sekolah kita sekolah adwiyata baru diterapkan sekolah kawasan tanpa rokok sesuai perda KTR"</i>			
	MA	<i>".. tidak ada pembagian wewenang khusus semua berhak menegur dan memberi saran."</i>			
	DW	<i>"...semua berwenang untuk menegur, mengawasi di sekolah ini untuk tidak ada yang merokok."</i> <i>"..kalau pembagian wewenang tidak ada, semua orang yang ada di sekolah ini berhak untuk menegur atau memberikan saran."</i> <i>".. menurut ku semua orang berwenang ji untuk</i>			



		<i>mengawasi menegur di sekolah ini agat tidak ada yang merokok di kawasan tanpa rokok.”</i>			
SOP pelaksanaan kawasan tanpa rokok	HM FD MZ DW RW MR	<p><i>“..tidak ada SOP pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara khusus.”</i></p> <p><i>“..belum ada kalau SOP khusus, namun semua melaksanakan tugasnya masing-masing.”</i></p> <p><i>“..Kalau SOP secara khusus belum adapi di buatkan.”</i></p> <p><i>“..SOP belum ada untuk pelaksanaan kawasan tanpa rokok secara khusus.”</i></p> <p><i>“.. untuk Penerapan SOP secara khusus belum ada di buat dek .”</i></p> <p><i>“.. Mengenai soal SOP belum ada untuk pelaksanaan kawasan tanpa rokok secara khusus dek.”</i></p>			
Kelompok kerja/komite pelaksanaan kawasan tanpa rokok	HM FD	<p><i>“..belum ada kelompok kerja khusus, BK yang memiliki wewenang dalam memberikam bimbingan kepada siswa kadang juga guru-guru juga ikut memberikan nasihat sebelum memulai pelajaran.”</i></p> <p><i>“... belum ada kelompok kerja khusus pelaksanaan kawasan tanpa rokok, namun semua bekerja sama dengan baik untuk menciptakan kawasan tanpa rokok</i></p>			



		<i>di sekolah.”</i>			
--	--	---------------------	--	--	--

#### 4. Aspek disposisi (sikap)

Hasil wawancara mendalam dengan anggota DPRD, kepala dinas kessehatan, dinas pendidikan kabupaten pangkep

Pertanyaan	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Preposisi
Dukungan mengenai Perda KTR No. 10 Tahun 2013	MS	<i>“...saya sangat mendukung dengan adanya perda ini, ada aturan tata tertib yang harus dipatuhi, semoga saja aturan penegakannya lebih efektif.”</i>	Tanggapan mengenai kawasan tanpa rokok menekan pertumbuhan perokok dari jawaban informan setuju mengenai adanya perda yang diharapkan dapat menekan jumlah perokok di kalangan anak remaja dan diharapkan bukan	Dukungan tentang kawasan tanpa rokok sangat efektif menekan angka perokok karena semua orang setuju dengan adanya aturan yang di buat dan dapat mematuhi	Informan sepatutnya bahwa dengan adanya KTR mampu menekan jumlah perokok karena dapat membatasi leluasa merokok di tempat-tempat kawasan tanpa rokok.
	HM	<i>“...sangat mendukung yah dengan adanya ini perda jadi kalau misalnya kita tegur orang tidak akan marah karena memang ada</i>			



		<p>perdanya No. 10 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok.”</p>	<p>hanya sekedar aturan saja.</p>		
	RP	<p>“..saya sangat setuju dengan ini perda KTR dengan adanya tata tertib yang harus dipatuhi, dan saya tidak merokok dan apabila ada yang melanggar saya akan menegur.”</p>			
	DW	<p>“..saya sangat mendukung bagus sekali dengan adanya Perda No. 10 tahun 2013 karena mampu memberikan peringatan bahwa dilarang merokok jika telah memasuki area yang telah diatur dalam perda.”</p>			
	MR	<p>“..Saya sangat mendukung dengan adanya perda No. 10 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok</p>			



		<i>karena mampu menekan jumlah perokok dan semua orang yang berada dikawasan tanpa rokok dapat mengikuti aturan tersebut.”</i>			
Keinginan dan harapan Tentang Penerapan Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	HM	<i>“.. harapan saya dengan adanya perda ini seluruh siswa saya dan semua yang ada dilingkungan sekolah ini terbebas dari asap rokok.”</i>			
	FD	<i>“..mau sekali terbebas dari asap rokok. Saya dukung sekali kalau ada pembatasan area-area untuk merokok jadi bisa menikmati udara segar.”</i>			
	RW	<i>“..berharap sekali kalau sekolah ini 100% terbebas dari asap rokok.”</i>			



	MR	<p><i>".. saya berharap sekali dek terbebas dari asap rokok dengan adanya pembatasan area-area untuk merokok jadi banyak ruang publik yang bisa dinikmati tanpa adanya asap rokok."</i></p>			
	RP	<p><i>"..Tanggapan saya mengenai hal ini saya sangat ingin siswa saya dan seluruh yang ada dilingkungan sekolah terbebas dari asap rokok."</i></p>			
	DW	<p><i>"..harapan saya akan berjalan efektif ini perda dek kalau semua aturannya ditaati dan sosialisasikan dengan baik untuk menjaga lingkungan bersih dan sehat untuk hirup"</i></p>			



		<i>udaranya tanpa ada asap rokok.”</i>			
Sanksi yang diberikan	HM	<i>“... sanksi yang diberikan pada siswa yang melanggar perda hanya berupa teguran setelah berkali-kali melanggar barulah pemanggilan orang tua kalau guru atau tamu belum ada sanksi khusus cuman ditegur dan kesadaran sendiri tidak memberikan contoh yang baik.”</i>			
	MZ	<i>“..sanki yang di berikan hanya berupa teguran.”</i>			
	MA	<i>“..teguran dan diberikan pembinaan oleh guru BK”</i>			
	HM	<i>“Sanksi yang diberikan</i>			



		<p>pertama itu hanya berupa teguran pembinaan di bagian BK, dan pemanggilan orang tua jika terus melanggar.”</p> <p>MR</p> <p>“..yang melanggar bagi siswa atau guru masi diberi teguran dan kadang juga siswa yang melanggar di suruh untuk cuci WC.”</p> <p>RP</p> <p>“.. sanksi yang diberikan biasanya siswa dibuat jerah suruh untuk merokok tanpa memegang rokok sampai rokoknya habis dan kalau sudah keseringan melanggar baru di panggil orang tuanya.”</p>			
	n area efektif	HM	“.. mungkin saja bisa menurunkan tapi saya tidak yakin akan hal itu		



menurunkan angka perokok	FD	<p><i>karena itu hanya dari kesadaran orang-orang yang merokok, dan mungkin jika di tingkatkan lagi pengawasannya dengan baik dapat berjalan dengan maksimal.”</i></p>			
	DW	<p><i>“... mungkin harus ada kerja sama yang baik dari dinas kesehatan, dinas pendidikan untuk terus awasi dan penerapannya bisa berjalan efektif dan menurunkan angka perokok.”</i></p>			
	MR	<p><i>“..dengan kerja sama yang naik dan meningkatkan pengawasan akan mampu menurunkan jumlah perokok.”</i></p>			



	MZ	<p><i>"...Terkait dengan tingginya jumlah perokok bisa dimaksimalkan pengawasannya dengan baik agar mungkin dapat berkurang jumlah perokok."</i></p>			
	MA	<p><i>"..Menurut saya mungkin bisa selama pengawasannya di tingkatkan lagi, dan dengan kerja sama yang baik."</i></p>			



Dokumentasi spanduk, baleho dan papan informasi yang ada di SMAN 1 Pangkep, SMAN 11 Pangkep, SMA Muhammadiyah Pangkep dan SMKN 7 Pangkep





### Dokumentasi Kegiatan Penelitian



FGD pada siswa



Wawancara dengan Anggota DPRD Komisi II



Wawancara dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 903/S.01/PTSP/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar Nomor : 1376/UN4.14/PT.01.04/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : KHUMAIRAH  
Nomor Pokok : K012181101  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMA KABUPATEN PANGKEP "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl: 12 Februari s/d 12 Maret 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 12 Februari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
A. M. YAMIN, SE., MS.  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513-199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





### SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanudin Makassar dengan ini menerangkan kepada

Nama	<b>KHUSAIRAH</b>
NIM	K012181101
Jurusan/Prodi	Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	Mahasiswa S2
Alamat	Jl. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul  
**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH No. 10 TAHUN 2013 TENTANG  
KAWASAN TAMPAS ROKOK DI SMA KABUPATEN PANGKEP"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Pangkajene, 29 Juni 2020

Kepala Sekolah,  
SMA Muhammadiyah Pangkajene

**Dr. MUZAKIR**  
NIP. 19611128 198903 1 012





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
UPT SMA NEGERI 1 PANGKEP**



Alamat : Jl. A.Mauraga No. 1 Pangkajene Tlp. (0410) 21059 Kode Pos 90611  
NSS / NPSN : 301190202001 / 40300692 email: [smn1pangkep@gmail.com](mailto:smn1pangkep@gmail.com)

Akreditasi A

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 421.3/114- UPT SMA 1/ PKP/DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. NURDIN ABU, M.Si  
NIP : 19620426 199003 1 006  
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa:

Nama : KHUMAIRAH  
NIM : K012181101  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Telah melakukan penelitian pada SMA Negeri 1 Pangkep, dalam rangka penyusunan *Tesis* dengan judul:

***“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SMA KABUPATEN PANGKEP”***

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 30 Juni 2020  
Kepala UPT SMAN 1 Pangkep,

  
 Drs. H. NURDIN ABU, M.Si  
 NIP. 19620426 199003 1 006

